



Negara Ummat dan Pendidikan Islam Bernegara: Strategi Kebangkitan Menuju 2045

Nunu A Hamijaya¹

¹ Gala Pustaka Nusantara (Gapura) Project Pusat Studi Sunda, Bandung, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 10-07-2025

Revised 23-08-2025

Accepted 25-09-2025

Published 02-10-2025

Keywords:

Golden Indonesia 2045;

Nation of the Ummah;

State-run Islamic

Education;

Self-government;

Shura

Correspondence:

nunuahamijaya68@gmail.com

Abstract

The existence of the Ottoman Empire (1299–1924) as a political power and center of Islamic civilization represents a crucial phenomenon in world history. This study aims to analyze the political system, governance, state structure, and the development of intellectual, scientific, religious, and cultural life during the Ottoman era, covering the empire's establishment, golden age, and eventual decline. The research adopts a qualitative historical method through literature review of secondary sources (books, journals, manuscripts) and translated primary sources (archives, works of scholars). The findings reveal: (1) A political system based on absolute monarchy and a hybrid legal framework (Hanafi sharia-kanun) supported imperial expansion and multiethnic stability; (2) A structured education system (madrasah) and state patronage fostered advancements in applied sciences (astronomy, medicine, architecture) and cultural expression in arts and language; (3) Islamic spirituality was mobilized through the caliphate title and ghaza narrative; (4) The millet system accommodated diversity, though bureaucratic stagnation and modernizing pressures led to decline. The novelty of this study lies in its holistic approach that integrates political, intellectual, and cultural aspects, revealing the interconnection between power and civilizational dynamics. The implications offer a comprehensive perspective for Islamic historical studies, emphasizing that Ottoman glory was sustained through the integration of knowledge, religion, and governance rooted in Islamic principles.

Indonesia Emas 2045 adalah harapan kolektif bangsa untuk meraih kejayaan. Di usia yang akan memasuki abad kedua kemerdekaannya bercita-cita menjadi bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat. Namun jalan menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya ditempuh dengan pembangunan ekonomi dan teknologi. Lebih mendasar dari itu, dibutuhkan pendidikan politik Islam atau pendidikan Islam bernegara yang melahirkan generasi beriman, berilmu, dan berintegritas. Artikel ini mengembangkan gagasan dari buku Negara Ummat: Zelfbestuur Berdasarkan Syariat karya Nunu A. Hamijaya, dengan menekankan bahwa kebangkitan bangsa berawal dari kesadaran umat akan jati dirinya sebagai subjek sejarah dan politik. Konsep negara dalam Al-Qur'an telah digambarkan sejak bahtera Nabi Nuh sebagai simbol tatanan kolektif beriman, berlanjut pada Baitul Arqom sebagai basis kaderisasi generasi pertama, hingga Negara Madinah yang dibangun Rasulullah ﷺ melalui Piagam Madinah. Semua itu adalah bentuk



pendidikan politik Islam: mendidik umat untuk bersatu, menghindari perpecahan, dan menegakkan ad-din dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks Indonesia, jejak tersebut tampak pada Sarekat Islam 1916 yang menggagas *zelfbestuur* (pemerintahan mandiri) hingga pembentukan kesadaran politik umat pada masa Piagam Jakarta dan perjuangan Masyumi. Pendidikan Islam bernegara telah lama menjadi napas perjuangan bangsa ini. Berdasarkan kajian tersebut, artikel ini merumuskan tiga fase peta jalan pendidikan Islam bernegara menuju Indonesia Emas. Pertama, 2025–2030: pembinaan generasi dengan kurikulum Qur’ani dan kaderisasi politik berbasis dakwah. Kedua, 2030–2040: institusionalisasi prinsip syura dalam kehidupan sosial dan politik, serta penguatan kepemimpinan ulama-intelektual. Ketiga, 2040–2045: lahirnya Indonesia Emas, ditandai oleh generasi pemimpin Qur’ani yang membawa bangsa menuju *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*. Sebagai puncaknya, artikel ini menawarkan Manifesto Pendidikan Islam Bernegara: sebuah deklarasi nilai dan strategi kebangkitan umat untuk memastikan bahwa cita-cita 2045 terwujud dalam arah yang diridhai Allah Swt.

A. PENDAHULUAN

Visi besar Indonesia Emas 2045, menggambarkan cita-cita bangsa untuk menjadi kekuatan baru dunia, dengan ekonomi kuat, masyarakat sejahtera, dan peradaban yang unggul. Namun, pertanyaan mendasar muncul: apakah visi itu cukup diukur dengan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan teknologi semata? Sejarah dunia mengajarkan bahwa banyak peradaban maju runtuh bukan karena miskin sumber daya, melainkan karena keruntuhan moral dan lemahnya fondasi spiritual.

Dalam pandangan Islam, kemajuan sejati hanya mungkin jika berlandaskan pada nilai-nilai ilahiah. Dalam Al-Qur’an Alloh menegaskan, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11). Ayat ini menjadi fondasi bagi seluruh upaya kebangkitan bangsa. Perubahan sosial, politik, dan ekonomi harus dimulai dari perubahan kesadaran dan pendidikan umat. Pendidikan dalam Islam tidak terbatas pada transfer ilmu pengetahuan, melainkan pembinaan akhlak, keimanan, dan kesadaran bernegara.

Inilah yang disebut pendidikan Islam bernegara. Pendidikan yang bukan hanya menyiapkan manusia beriman dan bertakwa, tetapi juga manusia yang sadar bahwa beragama dan bernegara adalah satu kesatuan amanah. Umat Islam Indonesia, yang menjadi mayoritas penduduk, memiliki tanggung jawab sejarah untuk menegakkan cita-cita ini.

Jejak sejarah bangsa menunjukkan pentingnya pendidikan Islam bernegara. Sarekat Islam pada 1916 melahirkan kesadaran politik umat melalui gagasan

zelfbestuur (pemerintahan mandiri). Piagam Jakarta pada 1945 merupakan simbol bahwa umat Islam telah memikirkan dasar filosofis bagi negara. Partai-partai Islam, gerakan ulama, dan konstituante 1959 adalah bukti bahwa umat berusaha memperjuangkan syariat dalam bingkai bernegara. Semua ini tidak lain adalah proses pendidikan politik umat yang berakar pada tauhid.

Namun, kondisi hari ini menunjukkan tantangan serius. Fragmentasi politik umat, lemahnya tradisi kaderisasi, dan krisis integritas para pemimpin membuat umat Islam sering kehilangan arah sejarahnya. Padahal, tanpa pendidikan Islam bernegara, cita-cita Indonesia Emas 2045 akan menjadi utopia yang rapuh.

Dengan latar belakang itulah, artikel ini hadir untuk menegaskan kembali relevansi gagasan Negara Ummat sekaligus pentingnya pendidikan Islam bernegara sebagai strategi kebangkitan bangsa menuju 2045.

Berdasarkan latar belakang tersebut, persoalan pokok yang dirumuskan dalam artikel ini adalah: Bagaimana konsep negara dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai bentuk pendidikan Islam bernegara? Bagaimana sejarah Islam di Indonesia menunjukkan jejak pendidikan politik umat dalam bernegara? Bagaimana strategi pendidikan Islam bernegara dapat menjadi peta jalan kebangkitan menuju Indonesia Emas 2045?

Artikel ini bertujuan untuk: Menggali dasar Qur'ani dan historis tentang pendidikan Islam bernegara, mulai dari kisah para nabi hingga Negara Madinah. Menelusuri sejarah pendidikan politik umat Islam Indonesia, khususnya melalui Sarekat Islam, Piagam Jakarta, dan perjuangan partai-partai Islam. Menawarkan strategi kebangkitan melalui pendidikan Islam bernegara sebagai peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Menyampaikan sebuah Manifesto Pendidikan Islam Bernegara yang dapat menjadi arah perjuangan umat dan bangsa di abad kedua kemerdekaan.

Penulisan artikel ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut: Secara teoritis: memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dengan menegaskan pentingnya pendidikan Islam bernegara sebagai kerangka analisis dalam pembangunan bangsa. Artikel ini menghubungkan konsep Qur'ani, sejarah Islam, dan realitas Indonesia kontemporer. Secara praktis: menjadi inspirasi bagi umat Islam, khususnya generasi muda, untuk memahami kembali peran mereka dalam membangun bangsa. Pendidikan Islam bernegara dapat menjadi bekal strategis dalam melahirkan pemimpin Qur'ani yang berintegritas. Secara ideologis: menghidupkan kembali gagasan Negara Ummat sebagai kerangka perjuangan umat Islam dalam politik

kebangsaan. Secara strategis: memberikan tawaran peta jalan dan manifesto yang dapat dijadikan pedoman bagi kebijakan pendidikan, organisasi Islam, dan gerakan dakwah menuju 2045.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan analisis reflektif. Beberapa langkah metode yang digunakan adalah:

1. Kajian Normatif: merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan, syura, dan bernegara.
2. Kajian Historis: menelusuri jejak pendidikan politik umat dalam sejarah Islam global dan Indonesia, termasuk bahtera Nabi Nuh, Baitul Arqom, Piagam Madinah, Sarekat Islam, Piagam Jakarta, dan perjuangan Masyumi.
3. Analisis Reflektif: mengaitkan nilai-nilai normatif dan historis tersebut dengan kondisi kontemporer bangsa Indonesia, serta menawarkan strategi menuju 2045.
4. Sumber Utama: buku Negara Ummat: Zelfbestuur Berdasarkan Syariat karya Nunu A. Hamijaya digunakan sebagai basis konseptual dan rujukan utama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penolakan dalam Perspektif Qur'an dalam Sejarah Kenabian

Al-Qur'an menjelaskan bahwa sejak awal, sikap manusia terhadap risalah selalu terbagi dua, ada yang menerima sepenuh hati, ada pula yang menolak. Penolakan umumnya bukan pada aspek ritual, melainkan ketika Islam hadir sebagai aturan sosial dan politik. Mereka rela shalat, shaum dan kurban, tetapi menolak syariat sebagai pedoman kepemimpinan dan pemerintahan.

Al-Qur'an menolak sikap parsial ini. Allah berfirman: "Apakah kamu beriman kepada sebagian isi kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian selain kenistaan di dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang berat." (QS. al-Baqarah: 85). Menerima ibadah tetapi menolak hukum dan keadilan sosial berarti menolak Islam itu sendiri.

Sejarah kenabian memperlihatkan pola yang sama. Kaum Nabi Nuh menolak bergabung dalam bahtera, karena tidak percaya risalah bisa mengatur keselamatan kolektif. Kaum Nabi Ibrahim tetap setia pada berhala meski diajak kepada tauhid. Kaum Nabi Musa, setelah diselamatkan dari Fir'aun, justru menyembah patung anak sapi dan menolak hukum Taurat. Hingga pada masa Nabi Muhammad Saw., Quraisy

menolak risalah bukan karena tidak percaya Tuhan, melainkan karena enggan menyerahkan tatanan sosial-politik Makkah pada wahyu.

Dengan demikian, penolakan terhadap Negara Umat pada hakikatnya bukan soal teknis pemerintahan, melainkan masalah iman. Ia lahir dari upaya memisahkan agama dari urusan publik, membatasi Islam pada ranah privat, dan menafikan perannya sebagai pedoman hidup menyeluruh.

2. Penolakan dalam Sejarah Indonesia dan Fakta Kontemporer

Jejak sejarah Indonesia memperlihatkan pola yang sama. Gagasan Islam sebagai dasar bernegara berulang kali dihadapang, meski umat Islam mayoritas. Pada 1916, Sarekat Islam mengusung ide *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri) dengan basis syariat, namun segera dituding berbahaya oleh kolonial Belanda. Strategi *divide et impera* berhasil memecah umat dan melemahkan politik Islam. Tahun 1945, tujuh kata Piagam Jakarta "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", dihapus karena kompromi politik. Pada 1960, Masyumi sebagai partai terbesar umat dibubarkan, sehingga umat kehilangan kendaraan politik utama.

3. Pendidikan Islam Bernegara dalam Sejarah Indonesia

Sejarah politik Indonesia tidak terlepas dari peran umat Islam sebagai mayoritas. Mereka tampil bukan hanya sebagai penggerak spiritual, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam perjuangan kemerdekaan, penegakan keadilan, dan pembentukan identitas kebangsaan. Pendidikan Islam bernegara hadir bukan sekadar gagasan normatif, melainkan realitas historis yang berulang kali mewarnai perjalanan bangsa.

a. Sarekat Islam dan Gagasan Zelfbestuur

Awal abad ke-20 menjadi titik balik penting melalui lahirnya Sarekat Islam (SI). Berawal dari perkumpulan pedagang batik di Solo tahun 1912, SI berkembang menjadi organisasi massa modern pertama yang memadukan semangat Islam, nasionalisme, dan perlawanan kolonial. Kongres 1916 di Bandung memperkenalkan gagasan *zelfbestuur* (pemerintahan mandiri), sebuah manifestasi kesadaran umat untuk menentukan nasib sendiri. SI menjadi "sekolah politik" yang mengajarkan arti persatuan, kemandirian, dan kepemimpinan berbasis iman. Dari rahim SI lahir

generasi Cokroaminoto, Agus Salim, hingga Soekarno, yang kelak memimpin bangsa menuju kemerdekaan (Hamijaya dkk, 2017).

b. Piagam Jakarta 1945: Kompromi Politik Islam

Menjelang proklamasi, umat Islam mengusulkan fondasi negara yang berlandaskan tauhid dan syariat. Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan melahirkan Piagam Jakarta dengan rumusan sila pertama: "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Rumusan ini merupakan puncak kompromi politik umat, menghubungkan nilai Qur'ani dengan realitas pluralitas Nusantara. Meski tujuh kata kemudian dihapus, Piagam Jakarta tetap menjadi simbol bahwa umat Islam adalah subjek politik bangsa. Ia meninggalkan tiga pelajaran pokok: kesadaran konstitusional, kemampuan kompromi, dan amanah sejarah (Hamijaya dkk, 2018).

c. Masyumi dan Pendidikan Politik Umat

Pasca-kemerdekaan, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) berdiri sebagai wadah politik umat. Dalam sistem demokrasi, Masyumi menjadi partai besar yang memperjuangkan aspirasi Islam secara konstitusional. Tokoh-tokohnya, seperti Mohammad Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara, menunjukkan integritas kepemimpinan sekaligus kontribusi strategis, misalnya melalui Mosi Integral dan PDRI. Perdebatan di Konstituante (1956–1959) memperlihatkan keseriusan politik Islam dalam memperjuangkan Piagam Jakarta. Meskipun Masyumi dibubarkan tahun 1960, partai ini menjadi laboratorium politik Islam yang mengajarkan bahwa politik adalah amal shalih, persatuan adalah kunci kekuatan, dan integritas pemimpin adalah syarat utama Anshari, 1986).

d. Fragmentasi dan Pembelajaran Sejarah

Pembubaran Masyumi menandai awal fragmentasi politik Islam. Orde Lama dan Orde Baru mempersempit ruang gerak partai-partai Islam, hingga umat kehilangan wadah besar yang menyatukan aspirasi. Pasca-Reformasi 1998, kebebasan politik kembali terbuka, namun justru melahirkan banyak partai Islam dengan suara yang terfragmentasi. Umat mayoritas secara demografis, tetapi minoritas secara politik. Dari sini muncul pelajaran penting: tanpa kesatuan dan kaderisasi yang matang, kekuatan politik umat akan melemah dan mudah terkooptasi kepentingan praktis (Firdaus, A N, 1999).

e. Pesantren, Ulama, dan Gerakan Mahasiswa

Di luar jalur partai, pesantren, ulama, dan organisasi mahasiswa tetap menjadi benteng pendidikan politik. Pesantren sejak awal berfungsi sebagai pusat kaderisasi umat, melahirkan tokoh-tokoh seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, dan KH. Agus Salim yang memadukan agama, politik, dan kebangsaan. Ormas-ormas Islam serta organisasi mahasiswa (HMI, PII, IMM, PMII, KAMMI) menjalankan fungsi Baitul Arqam modern, mendidik kader Qur'ani sekaligus melekat politik. Pendidikan kultural ini menjaga kesinambungan ruh perjuangan, meski umat kehilangan kekuatan formal dalam sistem politik (Hasbullah, M, 2017).

f. Relevansi Sejarah bagi Indonesia Emas 2045

Sejarah politik Islam di Indonesia menegaskan pola berulang: persatuan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kelemahan. Menuju Indonesia Emas 2045, umat Islam perlu menjadikan pendidikan Islam bernegara sebagai peta jalan strategis. Nilai-nilai *zelfbestuur*, semangat Piagam Jakarta, etos Masyumi, serta tradisi pesantren dan ulama harus dihidupkan kembali. Dengan demikian, sejarah berfungsi sebagai guru sekaligus peringatan, agar mayoritas umat tidak kehilangan arah, tetapi justru menjadi lokomotif kebangkitan bangsa menuju Baldatun Tāyibatun wa Rabbun Ghafur.

4. Manifesto Pendidikan Islam Bernegara: Strategi Kebangkitan Menuju 2045

Segala uraian pada bab-bab sebelumnya, dari fondasi Qur'ani hingga pengalaman historis umat Islam Indonesia, menunjukkan satu hal yang pasti: kebangkitan umat dan bangsa tidak mungkin lahir tanpa pendidikan Islam bernegara. Al-Qur'an telah mendidik umat dengan kisah bahtera Nabi Nuh, Baitul Arqam, dan Negara Madinah. Sejarah Indonesia pun telah memberi pelajaran melalui Sarekat Islam, Piagam Jakarta, Masyumi, pesantren, dan peran ulama. Semua itu adalah mata rantai yang mengarah pada satu kesimpulan: kita membutuhkan arah baru yang jelas, terumus, dan terikat dalam sebuah manifesto (Hamijaya, 2024).

Mengapa manifesto? Karena bangsa ini sedang menghadapi persimpangan sejarah. Indonesia akan memasuki usia seabad pada tahun 2045. Visi Indonesia Emas telah banyak didengungkan, tetapi sering kali dipersempit pada indikator ekonomi dan teknologi. Padahal, tanpa fondasi moral, spiritual, dan politik yang benar, kemajuan material hanya akan melahirkan krisis baru. Manifesto diperlukan untuk

memberi kompas ideologis dan strategis agar umat Islam sebagai mayoritas bangsa tidak kehilangan peran historisnya.

Manifesto Pendidikan Islam Bernegara ini adalah tawaran komprehensif yang lahir dari perenungan Qur'ani, pengalaman kenabian, dan perjalanan panjang umat Islam Indonesia. Ia bukan sekadar dokumen analisis, melainkan deklarasi nilai dan strategi kebangkitan. Manifesto ini dimaksudkan sebagai arah perjuangan umat menuju 2045: membina generasi dengan tauhid, melahirkan kepemimpinan Qur'ani, menghidupkan syura dalam tata negara, menegakkan keadilan sosial, serta menyatukan umat dalam ukhuwah Islamiyah.

Pendahuluan ini menegaskan bahwa Manifesto bukanlah tambahan retorika, melainkan kebutuhan mendesak. Tanpa kerangka yang jelas, umat akan terus berjalan tanpa peta. Dengan manifesto, umat memiliki arah, visi, dan strategi yang dapat diwariskan kepada generasi penerus. Inilah yang akan memastikan bahwa cita-cita Baldatun Ṭayyibatun wa Rabbun Ghafur bukan hanya impian, tetapi kenyataan pada tahun 2045.

a. Prinsip-Prinsip Dasar Manifesto

Manifesto Pendidikan Islam Bernegara tidak bisa lahir dari ruang kosong. Ia harus berpijak pada prinsip-prinsip Qur'ani yang sejak awal telah ditanamkan Allah dalam kehidupan umat. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi roh, arah, dan orientasi seluruh pendidikan serta perjuangan politik umat Islam. Tanpa prinsip ini, pendidikan Islam bernegara akan kehilangan arah dan mudah tergelincir menjadi sekadar retorika atau pragmatisme politik.

1) Tauhid: Fondasi Ideologi

Tauhid adalah pusat dari seluruh kehidupan Islam. Dalam konteks bernegara, tauhid menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas tertinggi. Segala hukum, kebijakan, dan tata aturan harus tunduk pada nilai ilahi. Tauhid membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia, ideologi sekuler, atau kepentingan pragmatis. Negara yang tidak berlandaskan tauhid akan rapuh, karena berdiri di atas nafsu dan relativitas manusia.

2) Syura: Metode Kepemimpinan

Syura adalah mekanisme Qur'ani untuk memastikan kepemimpinan berjalan adil dan partisipatif. Allah memuji orang-orang beriman sebagai mereka yang “urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka” (QS. Asy-Syura: 38). Dalam pendidikan Islam bernegara, syura harus diajarkan sejak dini: bagaimana

bermusyawarah, menghargai perbedaan, dan mengambil keputusan kolektif yang adil. Syura adalah antidot bagi otoritarianisme maupun individualisme.

3) 'Adl (Keadilan): Pilar Negara

Keadilan adalah tujuan utama syariat. Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil..." (QS. An-Nahl: 90). Negara Islam tidak dibangun untuk kepentingan elit, tetapi untuk memastikan keadilan menyentuh seluruh rakyat. Pendidikan Islam bernegara harus membentuk generasi yang memahami politik sebagai amanah untuk menegakkan keadilan, bukan alat memperkaya diri atau kelompok.

4) Ukhuwah: Basis Persatuan Umat

Allah memerintahkan umat berpegang teguh pada tali-Nya dan melarang berpecah belah (QS. Ali Imran: 103). Ukhuwah bukan sekadar jargon emosional, melainkan basis kekuatan umat. Dalam sejarah, Sarekat Islam dan Masyumi pernah menjadi simbol ukhuwah politik, sementara fragmentasi menjadi penyebab kelemahan. Pendidikan Islam bernegara harus menanamkan kesadaran bahwa persatuan di atas iman lebih utama daripada kepentingan politik sempit.

5) Jihad Ilmu dan Amal: Energi Kebangkitan

Jihad adalah pengerahan seluruh potensi untuk menegakkan kebenaran. Dalam konteks pendidikan Islam bernegara, jihad berarti kerja keras membangun ilmu, amal, dan peradaban. Generasi 2045 harus dididik untuk berjihad dengan pena, pemikiran, teknologi, dakwah, serta kepemimpinan. Jihad ilmu dan amal adalah energi yang akan menggerakkan umat menuju kejayaan.

Kelima prinsip ini—tauhid, syura, 'adl, ukhuwah, dan jihad—adalah fondasi tak tergantikan bagi Manifesto Pendidikan Islam Bernegara. Ia menjadi kurikulum abadi yang harus diajarkan, ditanamkan, dan diamalkan oleh setiap generasi. Tanpa prinsip ini, visi Indonesia Emas 2045 akan kehilangan ruh spiritual dan moralnya.

b. Pilar-Pilar Pendidikan Islam Bernegara

Agar Manifesto Pendidikan Islam Bernegara tidak berhenti sebagai gagasan normatif, ia harus diwujudkan dalam pilar-pilar pendidikan yang nyata. Pilar-pilar ini menjadi kerangka kerja praktis untuk membina generasi, menanamkan nilai, serta melahirkan kepemimpinan yang Qur'ani.

1) Pendidikan Iman: Menanamkan Tauhid dan Akhlak

Segala kebangkitan dimulai dari iman. Pendidikan iman berarti membangun akidah yang lurus dan akhlak yang mulia. Generasi muda harus ditanamkan

kesadaran bahwa iman adalah fondasi berbangsa. Tanpa iman, semua pencapaian hanya menjadi bangunan rapuh. Rasulullah ﷺ memulai dakwah dengan tauhid di Makkah, agar lahir generasi yang siap memimpin negara di Madinah.

2) Pendidikan Kepemimpinan: Kaderisasi Ulama-Intelektual

Setiap umat membutuhkan pemimpin. Pendidikan Islam bernegara harus melahirkan pemimpin yang bukan hanya cerdas intelektual, tetapi juga ulama yang takut kepada Allah. Dari Baitul Arqam lahir Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali—pemimpin yang memadukan iman dan kebijaksanaan. Demikian pula di Indonesia, pesantren, kampus Islam, dan ormas harus menjadi pusat kaderisasi kepemimpinan yang siap menuntun bangsa menuju 2045.

3) Pendidikan Politik Qur'ani: Memahami Syura dan Amanah

Generasi harus diajarkan bahwa politik adalah amanah, bukan perebutan kekuasaan. Syura, musyawarah, dan tanggung jawab sosial adalah prinsip yang harus ditanamkan. Pendidikan politik Qur'ani dapat berbentuk pengajian, pelatihan, simulasi musyawarah, hingga kurikulum resmi di sekolah dan pesantren. Dengan itu, generasi 2045 akan memahami bahwa bernegara adalah bagian dari ibadah.

4) Pendidikan Sosial-Ekonomi: Menumbuhkan Kemandirian Umat

Islam tidak hanya menekankan ibadah ritual, tetapi juga kemandirian ekonomi. Sarekat Islam pernah mengajarkan bahwa ekonomi dan politik adalah dua sisi perjuangan yang tak terpisahkan. Pendidikan Islam bernegara harus menumbuhkan etos wirausaha, kemandirian finansial, dan solidaritas sosial. Generasi emas 2045 tidak boleh hanya menjadi tenaga kerja, tetapi harus menjadi penggerak ekonomi yang berkeadilan.

5) Pendidikan Kebangsaan Qur'ani: Menghubungkan Islam dan Indonesia

Umat Islam Indonesia harus memahami bahwa perjuangan bernegara adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Sejarah Piagam Jakarta, resolusi jihad 1945, dan peran ulama dalam kemerdekaan harus terus diajarkan. Pendidikan kebangsaan Qur'ani berarti menanamkan kesadaran bahwa menjadi Muslim sejati juga berarti bertanggung jawab menjaga bangsa, menegakkan kedaulatan, dan membangun peradaban.

Kelima pilar ini membentuk kerangka pendidikan yang utuh: iman sebagai fondasi, kepemimpinan sebagai arah, politik Qur'ani sebagai mekanisme, ekonomi sebagai daya hidup, dan kebangsaan Qur'ani sebagai pengikat. Jika dijalankan secara konsisten, pilar-pilar ini akan melahirkan generasi yang siap memimpin Indonesia menuju Baldatun Ṭayyibatun wa Rabbun Ghafur.

c. Roadmap Pendidikan Islam Bernegara Menuju 2045

Manifesto Pendidikan Islam Bernegara membutuhkan arah strategis yang jelas, bukan hanya prinsip umum. Roadmap ini disusun untuk menuntun umat Islam Indonesia melangkah secara bertahap, dari kondisi sekarang menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Roadmap ini terbagi dalam tiga fase utama:

1) Periode 2025–2030: Fondasi Karakter dan Integritas

- Revitalisasi kurikulum iman dan akhlak: sekolah, pesantren, kampus, dan majelis taklim harus memperkuat tauhid, akhlak, dan literasi Qur’ani.
- Literasi sejarah Islam dan kebangsaan: generasi muda harus mengenal Sarekat Islam, Piagam Jakarta, Masyumi, dan perjuangan ulama agar tidak tercerabut dari akar sejarahnya.
- Gerakan anti-korupsi berbasis spiritual: pendidikan harus menanamkan kesadaran bahwa korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah Allah.
- Penguatan organisasi kaderisasi: ormas Islam, gerakan mahasiswa, dan komunitas dakwah harus menjadi pusat “Baitul Arqam modern”.

2) Periode 2030–2040: Institusionalisasi Syura dan Kepemimpinan Qur’ani

- Konsolidasi ormas dan partai Islam: mengurangi fragmentasi dengan membangun sinergi politik dan sosial.
- Pendidikan kepemimpinan ulama-intelektual: melahirkan pemimpin yang menguasai ilmu agama sekaligus piawai mengelola negara.
- Pusat Studi Islam Bernegara: universitas dan pesantren harus mengembangkan pusat riset tentang syura, keadilan, dan politik Qur’ani.
- Gerakan ekonomi umat: mendirikan koperasi, bank syariah, dan usaha produktif sebagai pilar kemandirian bangsa.

3) Periode 2040–2045: Generasi Pemimpin Qur’ani dan Indonesia Emas

- Lahirnya generasi negarawan Muslim: pemimpin yang berakar pada tauhid, berakhlak mulia, dan berkomitmen pada keadilan sosial.
- Integrasi syura dalam tata negara: praktik musyawarah Qur’ani menjadi budaya politik nasional.
- Keadilan sosial-ekonomi: distribusi kekayaan yang merata, hilangnya kesenjangan ekstrem.
- Terwujudnya Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur: sebuah bangsa yang sejahtera lahir batin, adil, makmur, dan diridhai Allah Swt.

Roadmap ini menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 bukan sekadar jargon ekonomi, melainkan cita-cita peradaban yang dibangun di atas fondasi pendidikan Islam bernegara. Dengan iman sebagai dasar, syura sebagai mekanisme, dan jihad ilmu-amal sebagai energi, umat Islam Indonesia dapat memimpin bangsa ini menuju kejayaan yang hakiki.

d. Manifesto Pendidikan Islam Bernegara

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengan penuh kesadaran sejarah serta tanggung jawab iman, kami menyatakan bahwa kebangkitan umat dan kejayaan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan melalui Pendidikan Islam Bernegara.

Kami meyakini bahwa pendidikan adalah jalan utama membentuk generasi beriman, berilmu, dan berintegritas. Pendidikan yang dimaksud bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan, tetapi pembinaan utuh yang menghubungkan tauhid dengan politik, syariat dengan kepemimpinan, dan iman dengan tanggung jawab kebangsaan.

Oleh karena itu, kami menegaskan Manifesto Pendidikan Islam Bernegara sebagai berikut:

- 1) Kami meyakini bahwa tauhid adalah fondasi negara. Segala kebijakan dan tata aturan harus berpijak pada kesadaran bahwa hanya Allah yang berhak ditaati sepenuhnya.
- 2) Kami menegakkan syura sebagai metode kepemimpinan. Musyawarah adalah mekanisme Qur'ani yang wajib dijalankan dalam politik, hukum, dan pemerintahan.
- 3) Kami menegakkan keadilan ('adl) sebagai tujuan negara. Politik adalah amanah, bukan alat untuk menindas atau memperkaya diri.
- 4) Kami memperkuat ukhuwah sebagai basis persatuan umat. Fragmentasi adalah kelemahan; persatuan di atas iman adalah kekuatan.
- 5) Kami menghidupkan jihad ilmu dan amal sebagai energi kebangkitan. Generasi 2045 harus dididik untuk berjihad dengan ilmu, teknologi, ekonomi, dan politik demi menegakkan kebenaran.

Lebih lanjut, kami menyerukan:

- Agar seluruh lembaga pendidikan Islam, pesantren, sekolah, universitas, dan majelis taklim, mengambil peran sebagai Baitul Arqam modern untuk melahirkan generasi pemimpin Qur'ani.

- Agar umat Islam membangun konsolidasi politik yang kokoh, menjadikan syura sebagai budaya bangsa, dan mengintegrasikan nilai Qur'ani dalam tata kelola negara.
- Agar visi Indonesia Emas 2045 dipahami bukan hanya sebagai pencapaian ekonomi, melainkan sebagai perwujudan Baldatun Ṭayyibatun wa Rabbun Ghafur: negeri yang baik dan diridhai Allah.

Manifesto ini adalah komitmen kami, bahwa pendidikan Islam bernegara adalah jalan kebangkitan umat dan bangsa. Dengan iman sebagai dasar, persatuan sebagai kekuatan, dan jihad ilmu serta amal sebagai energi, Indonesia akan memasuki abad emasnya bukan hanya sebagai bangsa besar, tetapi juga sebagai bangsa yang diridhai Allah Swt.

Manifesto Pendidikan Islam Bernegara yang telah dirumuskan bukanlah sekadar wacana intelektual atau retorika politik. Ia adalah seruan moral, kompas ideologis, sekaligus strategi kebangkitan bagi umat Islam Indonesia. Dari landasan Qur'ani, teladan kenabian, hingga pengalaman sejarah bangsa, semuanya telah menegaskan satu hal: umat Islam memiliki tanggung jawab untuk memandu arah perjalanan Indonesia menuju 2045.

Pendidikan Islam bernegara adalah jantung dari strategi ini. Melalui pendidikan, generasi dibentuk untuk beriman, berilmu, dan berintegritas. Melalui pendidikan pula, nilai-nilai tauhid, syura, keadilan, ukhuwah, dan jihad ilmu-amal dapat diwariskan secara sistematis. Pendidikan bukan hanya proses akademik, tetapi juga proses ideologis dan spiritual yang memastikan umat tidak tercerabut dari akar sejarah dan visi peradaban.

Dengan manifesto ini, umat Islam diingatkan kembali pada amanah besar sejarah: bahwa Indonesia merdeka lahir dengan perjuangan ulama, santri, dan tokoh Islam. Maka, menyongsong Indonesia Emas 2045 tidak boleh dilepaskan dari warisan itu. Umat Islam tidak cukup hanya menjadi penonton atau pengikut, tetapi harus menjadi lokomotif kebangkitan bangsa.

Kami menutup manifesto ini dengan doa dan harapan, “Ya Allah, bimbinglah kami untuk menegakkan agama-Mu dalam kehidupan berbangsa, persatukanlah hati kami dalam ukhuwah, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang bertakwa, dan jadikanlah negeri kami Baldatun Ṭayyibatun wa Rabbun Ghafur.”

Dengan itu, Manifesto Pendidikan Islam Bernegara bukan hanya sebuah teks, tetapi janji dan komitmen umat untuk melangkah menuju Indonesia Emas yang diridhai Allah Swt.

D. SIMPULAN

Perjuangan umat Islam dalam membangun bangsa bukan ambisi duniawi, melainkan amanah ilahi. Sejak awal, Allah telah menegaskan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dengan tugas menegakkan agama dan keadilan. Amanah inilah yang diwariskan kepada Rasulullah Saw., yang selama 23 tahun berjuang tanpa henti menata umat, dari individu hingga negara. Perjuangan itu berlangsung dalam dua fase besar. 13 tahun di Makkah, Rasulullah Saw. memusatkan dakwah pada pembinaan iman, penanaman tauhid, dan penguatan karakter. Generasi sahabat ditempa dalam kesabaran dan keteguhan menghadapi tekanan Quraisy. Fase ini menunjukkan bahwa kebangkitan umat harus diawali dengan pendidikan ideologis yang kokoh.

Setelah itu, 10 tahun di Madinah, Rasulullah Saw, membangun tatanan politik, hukum, dan sosial. Piagam Madinah menjadi simbol berdirinya negara berperadaban, yang menjamin keadilan dan melindungi keragaman. Fase ini menegaskan bahwa iman yang kuat harus berbuah dalam tata kelola negara yang adil. Sejarah Rasulullah saw. ini adalah peta spiritual yang harus diteladani umat Islam Indonesia: iman di Makkah menjadi analogi pendidikan karakter 2025–2030; hijrah dan syura di Madinah menjadi inspirasi untuk pendidikan kepemimpinan 2030–2040; dan kemenangan Islam menjadi teladan bagi Indonesia Emas 2045.

Perjuangan Islam di Indonesia tidak boleh dipandang semata-mata sebagai perebutan kekuasaan. Tujuan utamanya adalah menegakkan nilai-nilai suci: tauhid, syura, keadilan, ukhuwah, dan jihad ilmu-amal. Indonesia Emas 2045 hanya akan bernilai jika dicapai dalam ridha Allah, bukan sekadar dalam angka pertumbuhan ekonomi. Para ulama, santri, dan syuhada yang telah mengorbankan jiwa dan raga menunjukkan bahwa perjuangan Islam adalah jalan suci. Maka generasi kini wajib melanjutkan estafet itu dengan kesungguhan yang sama: membangun bangsa yang adil dan makmur sebagai ibadah kolektif.

Menyongsong abad kedua kemerdekaan, umat Islam harus bersatu di bawah panji tauhid. Fragmentasi politik yang melemahkan umat di masa lalu tidak boleh terulang. Manifesto Pendidikan Islam Bernegara yang telah dirumuskan pada arah

perjuangan bersama. Umat Islam Indonesia harus menapaki manhaj Rasulullah ﷺ: iman, hijrah, dan jihad. Iman, membangun generasi berkarakter Qur'ani. Hijrah, melakukan transformasi sosial-politik menuju tata negara yang adil. Jihad, mengerahkan ilmu, amal, dan kepemimpinan untuk kejayaan bangsa. Inilah jihad kolektif yang harus dihidupkan kembali: jihad ilmu, jihad akhlak, jihad kepemimpinan, dan jihad peradaban.

Harapan terbesar dari Manifesto ini adalah lahirnya generasi pemimpin Qur'ani pada tahun 2045: pemimpin yang berakar pada tauhid, berakhlak mulia, dan berkomitmen pada keadilan sosial. Generasi inilah yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang bukan hanya besar, tetapi juga diridhai Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Surjomihardjo. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.
- Adam, Asvi Warman - *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Yogyakarta Indonesia : Penerbit Ombak., 2004
- Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Waktu Niaga 1450-1680 Jilid Dua* (Jakarta: Yayasan Obor, 2015).
- Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo: fakta dan data sejarah Darul Islam*, Penerbit Darul Falah, 1999
- _____, *Negara Islam Indonesia: antara fitnah & realita*, Penerbit Madani Press, 2008
- _____, *Sepak Terjang KW9 Abu Toto Menyelewengkan NKA-NII Pasca S.M. Kartosoewirjo Masalah 1 Dari Serial Musuh-Musuh Darul Islam*, Penerbit Madani Press, 2000
- _____, *Reformasi Prematur : Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total* , Darul Falah, 1998
- Anastasius Daliman. *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak. 2001
- _____, *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial Dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*. Yogyakarta: Ombak.2012
- Anderson, Benedict. *Imagined Communities. Komunitas-komunitas Terbayang*. 2008 (Yogyakarta: INSIST Press & Pustaka Pelajar)
- Anshari, H. Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekuler" tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. 1986 (Jakarta: Rajawali).
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*. 1995 (Bandung: Mizan).
- Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Azyumardi Azra, *Perspektif Islam Di Asia Tenggara* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989).
- Purwanto, Bambang & Asvi Warman Adam, *Menggugat Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2005).
- Bloembergen, Marieke. 2009. *Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan Ketakutan*. Jakarta: Kompas.

- Bloembergen, Marieke. 2011. *Being Clean is Being Strong: Policing Cleanlines and Gay Vices in the Netherlands Indies*, dalam Kes van Dijk dan Jean Gelman Taylor *Clenliness and Culture*. Leiden: KITLV.
- Brousson, H.C.C. Clockener .2017. *Batavia Awal Abad 20* Gedenkschriften Van Een Oud Kolonial.Jakarta:Masup
- Bahar, Saafroedin dkk. Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 29 Mei-19 Agustus 1945.1992 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia).
- Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. 1985 (Jakarta: Pustaka Jaya).
- Bruinessen, Martin van. "Muslims of The Dutch East Indies and The Caliphate Question" dalam *Studia Islamika (Jakarta)*, Vol. 2 no. 3, 1995, 115-140.
- Baudet, H. dan I.J. Brugmans (ed). 1987. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Carey, Peter. 2004. *Asal Usul Perang Jawa; Pemberontakan Sepoy dan LukisanRaden Saleh*. Yogyakarta: LKiS.
- Chilcote, Ronald. 2004. *Teori Perbandingan Politik; Penelusuran Paradigma*.Jakarta: Rajawali Press.
- Cabaton Antoine. 2015. *Jawa, Sumatra & Kepulauan lain di Hindia Belanda*.Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Daliman. A. 2012. *Sejarah Indonesia Abad XIX – Awal Abad XX*. Yogyakarta : Ombak.
- Elson, R.E. *The Idea of Indonesia. Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. 2008 (Jakarta: Serambi).
- Fathurrahman, Oman. *Ithaf Al-Dhaki: Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim Nusantara*. 2012 (Bandung: Mizan).
- Federspiel, Howard M. 1996. *Persatuan Islam; Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firdaus A.N. 1999. *Dosa-Dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru Yang Tidak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Furnivall, J.S. 2009. *Hindia Belanda; Studi Tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Pres.
- Gouda, Frances. 2007. *Dutch Culture Overseas; Praktik Kolonial di Hinda Belanda 1900—1942*. Jakarta: Serambi.
- Guillot, C. 1985. *Kiai Sadrach; Riwayat Kristenisasi di Jawa*. Jakarta: Grafiti Pres.

- Hashem, O. 1968. *Menaklukkan Dunia Islam*. Surabaya: YAPI.
- Heuken SJ, Adolf. 2005. *Ensiklopedi Gereja. Jilid 5*. Jakarta: Yayasan Cipta LokaCaraka.
- Henk Schulte Nordholt, *De-colonising Indonesian Historiography* (Centre for East and South-East Asian Studies Lund University, Sweden, 2004 working paper no 6)
- Hasbullah, Moeflich. *Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara (Kajian Sosiologi Sejarah Indonesia)*, 2017. Kencana. Depok.
- Hamijaya, Nunu A, Fathia Lestari, dan Nunung K Rukmana, Titik Nol Kehendak Berpemerintahan Sendiri (Zelfbestuur, 1916). Pusbangter, Jatinangor.
- _____, Nunu A Fathia Lestari, dan Nunung K Rukmana . *Toedjoeh Kata - Sebuah Ijtihad Konstitusi Siyasah Kebangsaan Zelfbestuur 1916-1959*. 2018. Pusbangter, Jatinangor.
- _____, Nunu A , Dadan Hermawan, A; Chaidar (dkk) . *Antara Tjisajong dan Bangka : Revolusi Islam Bernegara di Indonesia, 1945-1949*. 2020. Pusbangter, Jatinangor.
- _____, Nunu A dan Al Chaidar . *1 Negeri 3 Proklamasi*. 2021. Pusbangter, Jatinangor.
- _____, Nunu A dan Irfan S Awwas . *Majelis Mujahidin : Menuju Indonesia Bersyariah*, 2023. Pusbangter, Jatinangor.
- _____, Nunu A, *Historiografi UIBI 1916-2016*, Pusbangter dan MPUII, 2023. Jatinangor,
- _____, Nunu A. *Negara Ummat : Zelfbestuur Berdasarkan Syariat*. 2024. Pusbangter, Jatinangor.
- Suminto, H. Aqib. 1996. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2009. *Api Sejarah. Jilid I*. Bandung: Salamadani.
- Susanto Zuhdi, Cilacap (1830-1942) *Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2002.
- Van Leur, *Indonesia Trade and Society Volume One Edisi Kedua* (Belanda: Van Hoeve The Hauge, 1967).
- Van Niel, Robert. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- _____. 2003. *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. Jakarta: LP3ES.
- Vlekke, Bernard H.M. 2008. *Nusantara; Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Umar, A. Muin, *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985

Wood, Micahel. *Sejarah Resmi Indonesia Modern: Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*, (Yogyakarta:Ombak, 2013), h. 1. Judul Asli: Official Historyin Modern Indonesia: New Order Perceptionsand Counterinterviews, Penterjemah: Astrid Reza dan Abmi Handayani